

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah pedesaan adalah salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana merujuk pada tulisan Ulumiyah dkk (2013:89) sebagaimana disebutkan bahwa pembangunan wilayah pedesaan mempunyai tujuan agar wilayahnya bisa menjadi sebuah wilayah yang sejahtera dan mandiri. Peningkatan kualitas mutu hidup masyarakatnya juga menjadi sebuah hal yang penting dalam menciptakan sebuah wilayah yang mandiri dan mempunyai taraf hidup yang berkualitas.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwasanya pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan terendah dan mempunyai andil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelahiran kembali desa menjadi sebuah angin segar bagi pembangunan kemandirian desa dalam berbagai bidang, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi kesempatan emas bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang

dimilikinya secara mandiri sesuai kondisi objektif desanya dalam rangka mendorong pertumbuhan masyarakat. Berdasarkan tulisan dari Laloma (2012:2) menyebutkan bahwa

”Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa, seperti dalam memberikan keterangan atau penjelasan kepada warga desa tentang program yang akan dilaksanakan, memberi persuasi atau ajakan dan dorongan kepada warga desa untuk ikut serta berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa”.

Pengoptimalan peran dari pemerintah desa menentukan keberhasilan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Penguatan peran dari pemerintah desa membuat masyarakat lebih aktif ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi wisata yang meliputi pegunungan, sungai, pantai, hutan serta kekayaan jenis hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas Provinsi Sumatera Utara. Pariwisata juga berperan dalam menambah devisa ataupun pendapatan, lapangan pekerjaan, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup bagi daerah yang mempunyai potensi yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata.

Kabupaten simalungun merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatra Utara yang merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan dapat menunjang nilai wisata di provinsi Sumatera Utara. Salah satunya Kecamatan di kabupaten Simalungun yang memiliki potensi wisata adalah kecamatan Dolok Pardamean. Di kecamatan ini

terdapat lokasi wisata pemandangan alam yang cukup dikenal masyarakat lokal maupun luar daerah.

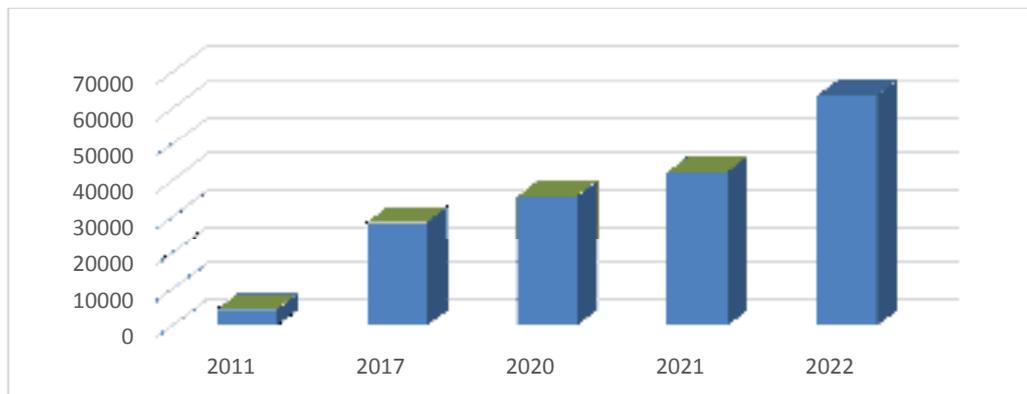
Pada Tahun 2020, garis kemiskinan Simalungun secara total sebesar Rp.387.549,- per kapita per bulan meningkat dari Rp. 359.540,- per kapita per bulan pada tahun 2019. Pada periode 2019 – 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan. P1 naik dari 0,99 pada Tahun 2019 menjadi 1,47 pada Tahun 2020, dan P2 juga mengalami peningkatan dari 0,18 pada Tahun 2019 menjadi 0,35 pada Tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat.

Desa Tigaras memiliki sumber daya alam yang tinggi di sektor pariwisata dibandingkan dengan desa-desa lain sebab wilayah desa Tigaras berada dipinggiran Danau Toba yang wilayahnya terdiri dari hutan, perbukitan dan perairan Danau Toba. Saat ini kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, yaitu sebagai kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan Danau Toba juga sudah diusulkan untuk masuk menjadi salah satu anggota Global Geopark Network (GGN) yang didirikan pada 1998 oleh UNESCO.

Sejak awal 2022, Nagori Tigaras telah menjadi Desa Wisata berdasarkan Assessment yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun.

Potensi utama yang digaribawahi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun dari Nagori ini adalah Tempat Rekreasi buatan dan situs alam.

Jumlah kunjungan objek wisata alam khususnya panorama alam mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun yang memiliki jumlah pengunjung paling banyak sehingga objek wisata alam di Tigaras ini memiliki peluang untuk dilakukan pengembangan, untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 1.**

### **Data Pengunjung di Desa Tigaras**

*Sumber: Wawancara dengan salah satu aparat desa Tigaras (8 Mei 2023)*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Tigaras pada setiap tahun terus menunjukkan peningkatan. Bahkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup drastis, dari tahun 2011 berjumlah 4.500 pengunjung di tahun 2017 menjadi 28.700 pengunjung dan pada tahun 2022 meningkat kembali mencapai 63.700 Pengunjung/tahun.

Walaupun memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, pengembangan pariwisata masih belum berjalan maksimal dengan sering banyaknya

miskoordinasi antara pihak desa dengan masyarakat seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam meningkatkan pariwisatanya. Masyarakat Desa Tigaras dan pemerintah desa masih belum bisa bersinergi dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam yang ada di desa tersebut. Selain itu, di Desa Tigaras juga terdapat calon destinasi lain yang apabila dikembangkan dapat menarik wisatawan.

Dalam hal ini, Pemerintah desa menjadikan regulasi sebagai legalisasi dalam struktur organisasi pengelola, yaitu sebagai pelindung terhadap jalannya pengembangan desa wisata. Masuknya unsur pemerintah desa dalam struktur organisasi pengelola desa wisata juga merupakan suatu cara atau teknik yang dikembangkan untuk tetap ikut dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang tujuan utamanya juga untuk pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu masyarakat desa diposisikan sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tanpa adanya kerjasama, kesatuan tujuan dan persepsi antar warga, serta warga bersama organisasi desa maupun institusi pemerintah desa maka dalam pengembangan desa wisata tidak akan pernah tercapai. Pada dasarnya

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dan diharapkan mampu menjadi garda terdepan di dalam mensukseskan program pembangunan khususnya pengembangan desa wisata.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Peran Pemerintah Desa untuk mengembangkan desa wisata di Desa Tigaras. Dengan demikian peneliti menetapkan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun”** sebagai bahan yang akan dijadikan topik dalam penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Tigaras?
2. Apa saja faktor penghambat Kontribusi Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Tigaras?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui;

1. Mengidentifikasi Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Tigaras

2. Mengidentifikasi faktor Penghambat Kontribusi Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Tigaras

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yaitu;

##### 1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata.
- b. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar mengetahui terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan stakeholder yang terlibat pada pengembangan desa wisata.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Tigaras dalam hal kaitannya pada pengembangan desa wisata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Peran Pemerintah Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Peran**

Kata peran biasanya diberi akhiran “an” maka menjadi sebuah kata Peranan yang artinya yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan karena suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:212) Peran merupakan “Aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengankedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Sedangkan Menurut Abu Ahmadi (2015) peran adalah “Suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsisosialnya.”

Selanjutnya menurut Merton (2007:67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan pengertian diatas hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2012:213) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dalam Zubaedi, 2012 : 64 “Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu dari pekerja masyarakat mempunyai peran dan tugas dalam melakukan pendampingan masyarakat sebagai:

1. Peran pendamping sebagai motivator,  
Dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat terhadap kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
2. Peran pendamping sebagai komunikator  
Dalam peran ini, pendamping harus menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat yang akan dijadikan rumusan dalam penangan dan pelaksanaan berbagai program serta sebagai alternatif pemecahan masalah.
3. Peran pendamping sebagai fasilitator,  
Dalam peran ini, pendamping berusaha memberikan pengarahan tentang penggunaan teknis, strategi dan pelaksanaan dalam program.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah desa, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah desa.

### **2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri

mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan.

Pemerintah Desa itu sendiri adalah penyelenggara urusan pemerintah di tingkat Desa yang merupakan kesatuan masyarakat dalam batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut HAW. Widjaja (2003:3) Pemerintah desa adalah :

“Kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menuruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten.”

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa

atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
- c. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
- d. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,
- e. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal itu, terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa terlaksana dengan baik.

## **2.2 Peran Pemerintah Desa**

Peran pemerintah desa adalah segala urusan yang dapat dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa yang membantu dalam menjalankan fungsi, tanggungjawab, dan kewajibannya menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang diperoleh dari kewenangan desa. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat penting terutama dalam meningkatkan serta mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mendorong jalannya

pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengembangan desa wisata, peran Pemerintah Desa didapatkan dari hak dan kewajiban yang dimiliki.

Dari hak dan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Desa mempunyai peran dalam pengembangan desa wisata Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar di antaranya

tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

## **2.3 Konsep Pariwisata**

### **2.3.1 Pengertian Pariwisata**

Pariwisata dalam arti etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali, atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Dalam arti luas pariwisata merupakan kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas pariwisata sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Suwanto (1997:3) menyatakan bahwa, pariwisata adalah suatu kegiatan bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya.

Kemudian menurut Meyers (2009) pada buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (2017:16) menyatakan bahwa ;

“Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya.”

Wardiyanta (2006:49-50) menyatakan bahwa pariwisata memiliki dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansial. Dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk

memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sedangkan sebagai sebuah substansi, pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki.

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pada hakikatnya pariwisata merupakan suatu proses bepergian sementara waktu dari seseorang atau lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, ataupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar.

### **2.3.2 Desa Wisata**

Menurut Nuryanti (2015:7) bahwa, “Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”.

Kemudian menurut Subagyo dalam buku Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal (2015:7) menyatakan bahwa,

“Jika dilihat dari kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan adalah suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alamnya, dan budayanya sehingga mempunyai peluang dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing.”

Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek dan sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggaraan sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Oleh karenanya peran aktif masyarakat sangat menentukan

kelangsungan kegiatan pariwisata tersebut. Keberhasilan desa wisata dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen, dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak.

Daya tarik wisata menjadi komponen utama dan sangat penting dalam pariwisata karena merupakan segala sesuatu yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Suryadani dan Octavia (2015:520), daya tarik wisata dibedakan menjadi tiga, antara lain:

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam  
Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu:
  - a. flora dan fauna,
  - b. keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya pantai dan hutan bakau, gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun, dan danau,
  - c. budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan.
2. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya  
Daya tarik wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, serta pertunjukan dan kerajinan.
3. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus  
Daya tarik wisata minat khusus merupakan jenis wisata baru yang dikembangkan di Indonesia, wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Contohnya berburu, mendaki gunung, arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata dll.

Dalam perkembangannya, para wisatawan mulai menggemari tempat wisata yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan alamnya saja tetapi lebih kepada interaksi masyarakatnya. Oleh karena itu mulai semakin berkembang jenis wisata minat khusus atau wisata alternatif. Simanungkalit (Ed., h.3)

menyatakan bahwa, wisata minat khusus adalah bentuk wisata dimana wisatawan memiliki bekal berupa keahlian dan ilmu pengetahuan atas daya tarik wisata pada destinasi pariwisata yang dikunjunginya. Wisata minat khusus biasanya disebut juga dengan istilah desa wisata. Desa wisata ini bertujuan untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Sedangkan menurut program Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dibuat oleh Departemen Pariwisata menjelaskan pengertian desa wisata sebagai berikut.

“Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.” (Priasukmana dan Mulyadin 2001).

Selanjutnya menurut Inskoop (1991), desa wisata adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional. Biasanya di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Maksud dari pengertian tersebut adalah desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

### **2.3.2.1 Indikator Desa Wisata**

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa-desa lainnya, Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001:38), Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Tujuan dari adanya pengembangan desa wisata sendiri adalah untuk melestarikan suatu kondisi lingkungan dan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal di suatu daerah sehingga melalui konsep desa wisata ini dapat menjadi salah satu bentuk pariwisata yang ramah lingkungan di masa depan (Juwita, 2010).

## **2.4 Pengembangan Desa Wisata**

Tujuan dari pembentukan Desa Wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan

di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Prasiasa (2011:101-104) menyatakan bahwa, pengembangan desa wisata menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahapannya. Tujuannya adalah agar pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat tersebut berwujud pada partisipasi yang dapat dilihat dalam lima tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan  
Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong pengembangan desa wisata.
2. Tahap Perencanaan  
Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang diberi kepercayaan dalam pengembangan desa wisata.
3. Tahap Operasional  
Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan non fisik. Partisipasi fisik dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya. Kedua, masyarakat menyediakan sumber-sumber penunjang seperti bangunan. Sedangkan partisipasi non fisik juga dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat dengan penuh kesadaran mempelajari bahasa asing. Kedua, masyarakat mempelajari pariwisata pada lembaga pendidikan formal.
4. Tahap Pengembangan  
Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan, antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pengelolaan usaha penginapa, usaha kerajinan, usaha warung makanan dan minuman, dll.

#### 5. Tahap Pengawasan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif untuk mencegah agar ddesanya tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif.

Sedangkan menurut Soemarno (2010:3-4), untuk mensukseskan pengembangan desa wisata diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan.
2. Kemitraan  
Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang- bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti: bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
3. Kegiatan Pemerintahan di Desa  
Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti: rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
4. Promosi  
Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.
5. Festival/Pertandingan  
Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bias menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.
6. Membina Organisasi Warga  
Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenaldengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka.
7. Kerjasama dengan Universitas.  
Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan

menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

Sebagai salah satu pekerja masyarakat yang bertugas dalam memajukan desa, peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tak luput dari perannya dalam mengembangkan desa, khususnya sebagai desa wisata. Dalam hal ini, pengembangan desa dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai suatu pembangunan desa yang otonom. Beberapa teori mengenai konsep pengembangan desa wisata terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Pengembangan desa wisata.**

No	Sumber Teori	Pengembangan desa wisata
1	Gumelar (2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat</li> <li>2. Menguntungkan masyarakat setempat</li> <li>3. Berskala kecil</li> <li>4. Melibatkan masyarakat setempat</li> <li>5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.</li> </ol>
2	Putra (2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pariwisata terintegrasi dengan masyarakat</li> <li>2. Menawarkan berbagai atraksi khas</li> <li>3. Akomodasi berciri khas desa setempat</li> </ol>

*Sumber : Zakaria (2014: 2)*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa salah satu konsep untuk mengembangkan desa wisata adalah dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa.

### **2.3.2.2 Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Djhani, (2003 : 43) mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberika daya atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerlwiss) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga menjadi keseimbangan. Menurut Parsons (1994 : 49) Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjdai perhatinnya.

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu:

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program penigkatan kapasitas.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna sebagai dorongan atau motivasi, bimbingan, serta pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri, upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemeberdayaan dalam mengubah prilaku, mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian
1	Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nadinda Shinta Fahira, Rusdianto Umar</li> <li>Muhammad Mujtaba Habibi</li> </ol>	<p>Latar belakang pengembangan wisata Sumber Complang berawal dari maraknya kemunculan tempat wisata yang menyajikan pemandangan alam yang asri dan indah. Hal tersebut membuat masyarakat sadar akan berlibur. Pemerintah desa Purworejo berinisiatif untuk mengembangkan potensi wisata yang telah ada agar dapat memberi manfaat untuk masyarakat dan desa.</p> <p>Faktor pendukung dalam pengembangan wisata Sumber Complang meliputi keadaan sumber daya alam, aksesibilitas, dukungan masyarakat, media sosial, dan keamanan. Setiap mengembangkan suatu objek wisata pastilah akan muncul suatu kendala atau penghambat dalam proses pengembangannya. Faktor penghambat dalam pengembangan wisata ini antara lain sumber daya manusia, faktor kebersihan, anggaran, tidak bekerja sama dengan pihak swasta, dan kurangnya media promosi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasihambatan tersebut yakni dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi, memperbaiki dan menambah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian</li> <li>Fokus penelitian pada peran pemerintah desa</li> </ol>	<p>Lokasi penelitian</p> <p>Hasil penelitian</p>

			media promosi, serta mencari investor.		
2	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG KEMBAR DESA RAKSABAYA	1. Eet Saeful Hidayat , 2. R Didi Djadjuli	Peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi objek wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya Kecamatan Cimargas kabupaten Ciamis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pemerintah Desa Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas telah menjalankan perannya dengan baik pada dimensi peran selaku inovator, peran selaku pelopor dan pelaksana pembangunan yang dibuktikan dengan pembangunan dan pengembangan objek wisata Curug Kembar yang terus berjalan sedangkan pada peran selaku stabilisator dan peran selaku moderenisator masih tergolong rendah karena masih belum adanya kesamaan persepsi dari unsur pemerintahan desa, BPD, LPM, aparat pemerintah desa dan kontribusi masyarakat Peran pemerintah desa sangat dominan sebagai aktor pembangunan yang akan memberikan ruh pada pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakatnya, namun dalam implementasinya turut dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat dalam merealisasikan tujuannya.	a. Metode penelitian b. Fokus penelitian pada peran pemerintah desa	a. Lokasi penelitian b. Hasil penelitian
3	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata pada Dusun Tradisional Sasak Sade	Zaenudin Amrulloh	Dusun Tradisional Sasak Sade, metode pengembangan pariwisata berbasis masyarakat telah dilaksanakan dengan	a. Metode penelitian b. Fokus penelitian pada Pemberdayaan Masyarakat	a. Lokasi penelitian b. Konsep penelitian

	Lombok NTB		<p>memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masyarakat miliki. Mengenai potensi yang terdapat pada masyarakat Dusun Wisata Sade mempunyai pengaruh besar. dalam pengembangan wisata dan adapun hasil dari pariwisata berbasis masyarakat yakni menambah pendapatan masyarakat setempat sehingga mampu hidup secara mandiri dan berdaya.</p>	c. Hasil penelitian
--	------------	--	--	---------------------

## 2.6 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2019) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan menjelaskan objek penelitian dan objek permasalahan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya

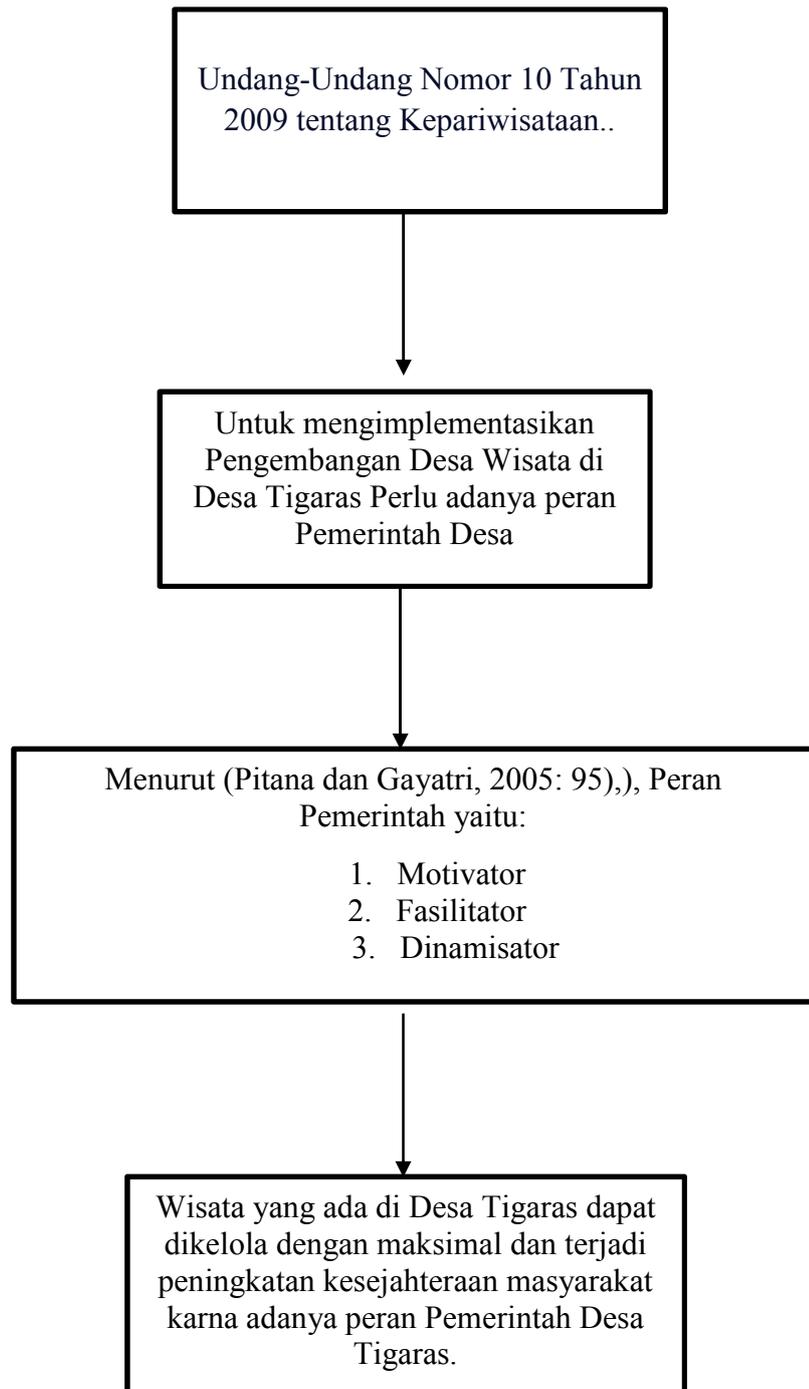
tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Desa Tigaras memiliki sumber daya alam yang tinggi di sektor pariwisata dibandingkan dengan desa-desa lain sebab wilayah desa Tigaras berada dipinggiran Danau Toba yang wilayahnya terdiri dari hutan, perbukitan dan perairan Danau Toba. Saat ini kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, yaitu sebagai kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. tetapi kenyataannya masih sulit dalam mengelola potensi-potensi tersebut dikarenakan paradigma-paradigma yang muncul sebelumnya mengenai desa adalah sesuatu tempat yang tertinggal dan tidak dapat mandiri yang pada akhirnya terlalu bergantung kepada bantuan pemerintah. Peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk mengelola potensi-potensi desa agar nantinya desa dapat berkembang dan berproduksi yang tentunya membuat desa menjadi terkenal dan bisa menjadi daya tarik wisata.

Desa Tigaras Memiliki potensi yang sangat Potensial karena memiliki sumber daya alam yang tinggi di sektor pariwisata dibandingkan desa lain, seharusnya potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. tapi pengembangan pariwisata masih belum berjalan maksimal dengan sering banyaknya misskoordinasi antara pihak desa dengan masyarakat dalam hal ini maka perlu adanya peran Pemerintah Desa dalam mengelola Desa Wisata di DesaTigaras. Untuk menjawab semua itu maka peneliti menggunakan teori Peran Pemerintah Desa. Pemerintah Desa mempunyai peran dalam

pengembangan desa wisata. Menurut Blakely (dalam Pitana dan Gayatri (2005:95)), Peran-peran tersebut meliputi ; Motivator, asilitator dan Dinamisator

Jika Pemerintah Desa menjalankan sesuai dengan teori tersebut maka Wisata yang ada di Desa Tigaras dapat dikelola dengan maksimal dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa.

**Bagan 1.2 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode Penelitian merupakan proses ilmiah untuk memperoleh data yang relevan dalam suatu proses penelitian. Dengan demikian metode penelitian dijadikan sebagai kaidah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat teruji secara ilmiah dengan berdasarkan pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan dan menggambarkan suatu persoalan yang menjadi permasalahan sosial dan dikaji menggunakan latar alamiah untuk menafsirkannya.

Menurut Creswell (2016:4) Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini adalah data yang dikumpulkan seperti kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif bisa digunakan untuk memahami interaksi sosial seperti dengan dilakukannya wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas dan juga observasi lapangan yang dilakukan peneliti serta dilengkapi dengan studi kepustakaan untuk dapat memperkuat penelitian sehingga peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bersifat menggambarkan atau mengungkapkan suatu keadaan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti, guna mendapatkan

manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini dan tujuan untuk mengidentifikasi Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun

### 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tigaras, Kecamatan dolok pardamean, Kabupaten simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pemilihan lokasi penelitian dilakukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun”, Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.

**Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jenis Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1. Persiapan Penelitian					
a. Pengajuan judul					
b. Penyusunan Proposal					
2. Seminar Proposal					
a. Revisi dan Perijinan					
3. Perencanaan Penelitian					
4. Pelaksanaan Penelitian					
5. Penyusunan Laporan					
6. Ujian dan Revisi					

### 3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif merupakan narasumber yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti sehingga dengan demikian informan menjadi hal yang sangat krusial karena menjadi kunci keberhasilan penelitian dengan perolehan data yang valid dan akurat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Menurut Moleong (2012:132), Informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian.

Mereka yang pada mulanya tergolong asing dengan penelitian sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber. Dalam penelitian ini ada tiga jenis informan yaitu :

#### 1. Informan kunci

Informan kunci adalah mereka yang mempunyai atau mengetahui suatu informasi pokok yang di perlukan peneliti dalam penelitiannya, informasinya terkait dalam pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan permasalahannya secara mendalam yang dapat diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Tigaras yaitu Bapak Togar Sitio.

#### 2. Informan utama

Informan utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis

dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala Dusun 1 yaitu Bapak Solly Sinaga dan Kepala Dusun 2 Bapak Harry Pranata Sidabalok.

### 3. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Ketua Pengelolah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yaitu Bapak Leo Rumahorbo.

## **3.4 Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbahasakan yang tidak didapat hanya dari wawancara. Seperti yang dinyatakan Creswell adalah “peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian. Creswell (2016:254). Pengalaman berperan serta strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis suatu dokumen, wawancara, partisipasi, dan observasi langsung, sekaligus dengan melakukan intropeksi.

### **3.4.1 Teknik Pengumpulan Data Primer**

yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Wawancara

yaitu dengan teknik wawancara mendalam dan wawancara bertahap. Bungin (2011:108) mengatakan bahwa wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sedangkan wawancara bertahap ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.

### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi

Dokumentasi teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa, metode dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam metode ini yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati sehingga

untuk menggunakan metode ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Sedangkan Herdiansyah (2015:245) menyatakan bahwa, dokumentasi pada umumnya digunakan sebagai instrumen tambahan saja yang sifatnya memperkuat atau menambah reliabilitas dari instrumen utama yaitu observasi dan wawancara. Bentuk dokumentasi yang bisa digunakan oleh peneliti yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

### **3.5 Teknik Penyajian dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif. Teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman dalam Herdiansyah (2010: 164) terdiri atas empat tahap antara lain:

#### **a. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatan- muatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

#### **b. Reduksi data**

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai

dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Menurut Herdiansyah (2015:264), inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

c. Penyajian Data

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Menurut Herdiansyah (2015:276), penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

d. Penarikan Kesimpulan

Herdiansyah (2015:279) menyatakan bahwa, kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2000:87), verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.